

Siti Khumayah

## ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PESTA DEMOKRASI (STUDI KASUS PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON)

Siti Khumayah<sup>1</sup>

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati

<sup>1</sup>mayasiti1718@gmail.com

**ABSTRACT** – The purpose of this study was to determine the level of voter participation in a democratic party, especially election of the village head. This research method using a qualitative descriptive analysis approach. Data collection techniques obtained by; 1) Literature or Literature Study, 2) Field Study, by means of: Observation; Interview; Documentation. While the data validity testing technique was carried out by the data triangulation technique test, namely (check, recheck, crosscheck) various data was obtained from various sources, from various methods / techniques, and from various times. Data analysis using descriptive data analysis techniques, which describes the actual situation of the object was researched according to the actual situation of the object was researched, according to the actual situation during the research. The results showed that the level of community participation was still low because the mindset was not yet open or the mindset was aware of the importance of choosing a village head leader. The low factor of community participation in the Village Head election process is also that voters prioritize work rather than spending time to vote, do not have adequate transportation facilities and are also far from home to the polling station.

**Keywords:** *Participation, democracy, Village head elections*

**ABSTRAK** - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi khususnya pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara; 1) Studi Kepustakaan atau Literatur, 2) Studi Lapangan, dengan cara: Observasi; Wawancara; Dokumentasi. Sedang Teknik Pengujian Keabsahan Data dilakukan dengan Uji teknik triangulasi data yaitu (check, recheck, crosscheck) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik, dan dari berbagai waktu. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti menurut keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Masyarakat masih rendah dikarenakan masih belum terbukanya mindset atau pemikiran sadar akan pentingnya memilih pemimpin kepala desa. Faktor rendahnya partisipasi Masyarakat dalam proses

pemilihan kuwu juga para pemilih lebih mengutamakan pekerjaan dibanding dengan meluangkan waktu untuk memilih, tidak mempunyai sarana transportasi yang memadai dan juga jarak dari rumah ke TPS yang jauh.

**Kata Kunci:** *Partisipasi, Demokrasi, Pemilihan Kuwu*

### PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil kedua setelah dusun dari wilayah administratif pemerintahan di Indonesia, yang juga merupakan wilayah otonom terkecil untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana yang termaktub didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desa merupakan adat dari kesatuan masyarakat setempat yang secara hukum diakui dalam sistem pemerintahan.

Sejak bergulirnya reformasi di tahun 1998 yang kemudian diundangkannya Undang-undang pemerintahan daerah di tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum secara langsung, ini pun berlaku bagi pemilihan kepala daerah diseluruh wilayah administratif di Indonesia tak terkecuali pemilihan kepala desa, dan ini merupakan suatu hal penting yang dilaksanakan disebuah negara demokrasi dengan dibarengi adanya kepedulian dan peran serta masyarakat

dengan memberikan partisipasi nyata didalam pemilihan tersebut.

Secara etimologi partisipasi mengandung arti bagian yang artinya mengambil, sehingga dapat diartikan “mengambil bagian”. Pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang lazim yang sering dilaksanakan disetiap desa dan merupakan suatu proses rutinitas disaat pergantian pemimpin desa. Kepala desa merupakan pemimpin wilayah teritorial dan administrative desa yang juga merupakan pimpinan dari pemerintahan desa dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dengan maksimal dua periode masa jabatannya. Kepala desa juga tidak bertanggungjawab kepada camat akan tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat yang memimpin kecamatan yang merupakan upkd dari kabupaten atau kota.

Partisipasi merupakan suatu konsep demokrasi yang mengusung dan menjunjung tinggi pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat karena hal ini merupakan salah satu pilar demokrasi, adapun bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaannya dalam pemilihan untuk memilih pemimpin bangsa maupun pemimpin pemerintahan daerah dan desa. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan satu atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam bidang politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan

itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, sehingga mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Demikian juga dengan partisipasi dalam pemilihan kepala desa atau di Kabupaten Cirebon masyarakat menyebutnya dengan pemilihan kuwu, yang diharapkan dari pemilihan ini adalah terpilihnya pemimpin desa, dengan kriteria bertanggung jawab dan mempunyai kecakapan khusus untuk mengelola desa dengan homogenitas kultur penduduknya, namun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada baik alam maupun SDM didalamnya. Pada kesempatan ini peneliti membatasi pengambilan lokasi untuk dijadikan obyek penelitian yaitu di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon dengan pertimbangan begitu luasnya wilayah Kabupaten Cirebon sehingga hanya diambil satu kecamatan yaitu Kecamatan Ciwaringin yaitu dianalisis tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi khususnya pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu konsep demokrasi, dan dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Secara umum partisipasi masyarakat dibidang politik adalah kegiatan satu orang warga negara atau kelompok orang untuk berperan aktif dalam kehidupan bernegara khususnya dibidang politik.

Siti Khumayah

Menurut Mirian Budiardjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik (2009: 205) mengatakan bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.

Sedangkan Surbakti (2007: 144) membagi tipe-tipe partisipasi masyarakat adalah, “1). Partisipasi aktif, yaitu kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah sehingga memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi; 2) Partisipasi Militan-Radikal, partisipasi yang cenderung mengutamakan cara-cara yang konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal; 3) Partisipasi Pasif, yaitu kegiatan warga negara yang menerima atau mentaati begitu saja segala kebijakan pemerintah; 4) Partisipasi Apatitis, yaitu kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah karena kekecewaannya”.

Menurut Adam (dalam Miaz, 2012: 20) partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam bidang politik. Ketertiban warga dalam penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi sangatlah penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui

partisipasi individu menjadi warga public dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

## 2. Kemandirian

Pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self* karena diri itu merupakan inti dari kemandirian (Ali & Asrori, 2008:109). Dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata “*independence*” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 2011:343).

Sedangkan kemandirian dapat diartikan juga sebagai kemampuan (*ability*) untuk berjuang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan potensi masyarakat tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian juga di definisikan sebagai adanya pembebasan (*inisiatif / inisiatif internal dan kemauan / motivasi*) untuk berjuang mencapai kehidupan yang sejahtera secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kemandirian desa berpusat pada kapasitas dan pembebasan lokal, yaitu kemampuan desa untuk mengembangkan aset-aset potensial, inisiatif dan gerakan kolektif. Bahkan dengan partisipasi pihak eksternal, partisipasi mereka lebih untuk memperkuat atau memberikan dukungan energi untuk mempercepat pencapaian tujuan.

Dari pengertian diatas kajian kemandirian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukan untuk perseorangan atau diri seseorang, namun

kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian untuk pemerintahan desa.

Konsep kemandirian desa (otonomi desa) adalah berkaitan dengan hal menunjukkan adanya kewenangan desa. Pemerintah desa berhak mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengukuran kemandirian desa ini menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi diri bagi desa sekaligus mendiagnosis atas berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

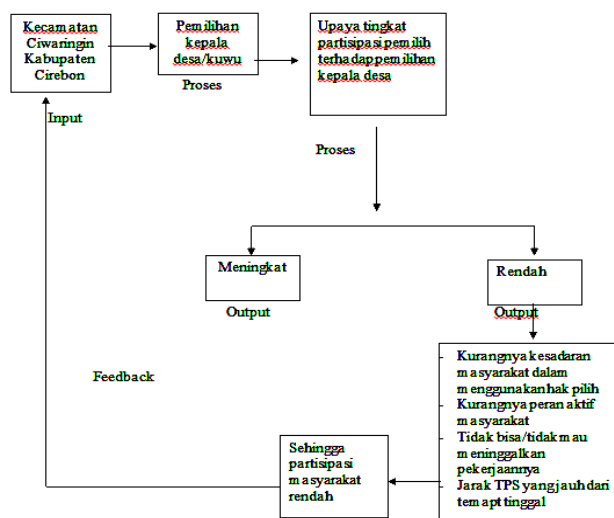
**3. Pemilihan Kepala Desa/kuwu**

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi dan sudah diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya oleh masyarakat di pedesaan, di masa demokrasi sampai saat ini, terutama bagi suatu pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik. Pemilihan kepala desa besar kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Desa dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan Kepala Desa akan menjadikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah tingkat II untuk dapat melakukan pemilihan kepala desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang.

Pemilihan Kepala Desa atau kuwu di Kabupaten Cirebon telah meningkatkan intensitas peran serta masyarakat di pedesaan dalam mengembangkan suatu kehidupan berdemokrasi. Pemilihan pemungutan suara melalui pencoblosan untuk memilih kepala desa ini merupakan bentuk langsung dari demokrasi yang dilakukan di pedesaan, dengan tujuan didapatkan pemimpin di tingkat desa yang dapat bertanggung jawab dan berhasil guna bagi masyarakat desanya dengan tujuan untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya dengan keterbatasan yang dimiliki oleh desa setempat.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dituangkan dalam tema partisipasi masyarakat di pemilihan kepala desa/pemilihan kuwu:



Gambar 1. kerangka pemikiran

**METODE PENELITIAN**

Menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa terutama di Kabupaten Cirebon.

Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2014:89) “Mengandalkan kekuatan pada *human*

Siti Khumayah

*instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam)". Serta dengan pengambilan sample, purposif sampel (*purposive sampling*) yaitu mengambil responden dengan cara sampling.

### **Teknik Pengumpulan, Uji Keabsahan dan Analisis Data**

a. Teknik Pengumpulan data dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan atau Literatur
- 2) Studi Lapangan, dengan cara : Observasi; Wawancara; Dokumentasi

b. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu (*check, recheck, crosscheck*) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik, dan dari berbagai waktu.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti menurut keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan**

#### **Kepala Desa di Kabupaten Cirebon**

Negara-negara demokrasi menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat merupakan hal yang lebih baik, semakin banyaknya masyarakat yang berperan serta atau berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin bangsa khususnya dalam hal ini adalah memilih kepala desa atau kuwu menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah

tersebut telah memahami dan mengaplikasikannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan politik dan kegiatan- kegiatan pemerintahan yang ada. Sebaliknya ketika peran serta atau partisipasi yang diberikan oleh masyarakat itu rendah, maka dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mempunyai empati terhadap program dan masalah pemerintahan. Lagi pula, dikhawatirkan jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin bangsa akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang terlihat dari kehadiran penduduk yang mengikuti dari jumlah daftar penduduk yang berhak memilih hanya sekitar 60-75 persen saja penduduk yang mengikuti, demikian juga halnya dengan pemilihan kepala desa di beberapa wilayah Indonesia tak terkecuali di Wilayah Kabupaten Cirebon khususnya di Kecamatan Ciwaringin.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah tersebut didapat masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin desa atau kepala desa dan di Kabupaten Cirebon tak terkecuali di Kecamatan Ciwaringin masyarakat biasa menyebutnya dengan pemilihan kuwu. Adapun penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut adalah disebabkan pemahaman yang sempit dari masyarakat bahwa demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut serta dalam penentuan siapa yang memimpin

mereka yaitu dengan melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), akan tetapi ada hal lain yang diungkapkan yaitu kurangnya kesadaran dari diri masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam menentukan kepala desa yang baik untuk dijadikan pemimpin desa. Bahkan tidak dapat di pungkiri lagi bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah nasional, sehingga dalam penanganannya pun tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja, akan tetapi dari masyarakatnya itu sendiri untuk menangani masalah ini.

Demokrasi yang salah satunya diimplementasikan melalui pemilihan kepala desa atau masyarakat Cirebon termasuk Kecamatan Ciwaringin menyebutnya dengan Pilwu, setidaknya dibentuk dalam tiga tata cara yang dihasilkan dari “kontraksosial” masyarakat setempat yaitu tata krama, tata susila dan tata cara atau aturan (*rule of law*). Tata Susila merupakan bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan dan juga kebersamaan.

Kecamatan Ciwaringin, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon dan telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, yaitu 3 desa dari delapan desa yang ada di Wilayah tersebut, yaitu : Desa Budur, Desa Babakan, Desa Bringin. Di desa Budur sendiri terdapat 4 orang calon kepala desa/kuwu, dan desa Bringin terdapat 3 orang calon kepala desa/kuwu sedangkan desa Babakan memiliki 4 (empat) calon kepala desa/kuwu.

Dari ke 3(tiga) desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa/kuwu serentak tersebut,

didapatkan hasil bahwa desa babakan merupakan desa yang partisipasi masyarakatnya rendah dengan pengungkapan data yang ada baik dari hasil wawancara maupun pengungkapan data langsung. Dari keempat calon yang ada yaitu : Saepudin, Saenadi, Syatori, Sayidi. Dimenangkan oleh calon dengan pemenang suara terbanyak yaitu dari nomor urut 3 yaitu Syatori dengan jumlah perolehan suara sebanyak 1.344 Jiwa, berikut data hasil laporan dari masing-masing desa antara lain :

Daftar Hak Pilih Tetap (DPT) dan yang menggunakannya dari tiga desa di Kecamatan Ciwaringin Kabuapten Cirebon yang mealkukan pemilihan serentak adalah sebagai berikut :

#### 1. Desa Budur

**Tabel 1.1**

No	TPS	Jumlah Hak Pilih	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	Jumlah Suara sah	Jumlah Suara tidak sah
1.	TPS 1	1.177	950	908	42
2.	TPS 2	1.197	949	924	25
3.	TPS 3	1.202	936	909	27

Sumber Sumber, data arsip setempat

Jika di persentasekan di desa budur tersebut didapat data bahwa sebanyak 20% penduduk yang mempunyai hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak hadir dan berpartisipasi di pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu dari jumlah hak pilih suara sebanyak 3.576 jiwa.

#### 2. Desa Beringin

**Tabel 1.2**

No.	Nama TPS	Jumlah Hak Pilih	Jumlah pemilih yang menggunakan hak	Jumlah Suara sah	Jumlah Suara tidak sah

**Siti Khumayah**

			pilih		
1.	TPS 1	1247	967	955	12
2.	TPS2	1224	964	957	7
3.	TPS3	1239	984	971	13

Sumber, data arsip setempat

Jika di persentasekan di desa budur tersebut didapat data bahwa sebanyak 21,4% penduduk yang mempunyai hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak hadir dan berpartisipasi di pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu dari jumlah hak pilih suara sebanyak 3.710 Jiwa.

### 3. Desa Babakan

**Table 1.3**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Jumlah hak pilih dalam DPT	3.416 Orang
2.	Jumlah yang menggunakan hak pilihnya	2.611 Orang
3.	Jumlah surat suara yang tidak sah	24 Orang
4.	Jumlah suara yang sah	2.587 Orang

Sumber data arsip setempat

Jika di persentasekan di desa budur tersebut didapat data bahwa sebanyak 20% penduduk yang mempunyai hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak hadir dan berpartisipasi di pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu dari jumlah hak pilih suara sebanyak 3.416 Jiwa.

Hasil dari ketiga data pemilih tiga desa tersebut dapat disimpulkan bahwa desa Babakan merupakan desa yang tingkat partisipasinya rendah, penyebab rendahnya partisipasi di desa Babakan antara lain : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan atau kurangnya peran aktif masyarakat, bahkan ada juga

yang dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya baik bekerja di kantor, berdagang maupun Bertani dan juga disebabkan olehn jarak yang jauh dari tempat pemilihan kepala desa/kuwu yang memerlukan sarana transportasi yang tidak dimiliki oleh sebagian pemilih.

### KESIMPULAN

Dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon khususnya di Kecamatan Ciwaringim masih rendah disebabkan oleh karena belum terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun desa yang salah satunya adalah memilih pemimpin desa atau kepala desa dan di Kabupaten Cirebon disebut dengan kuwu, sehingga tingkat kehadiran dalam pemilihan masih belum optimal;
- 2) Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini adalah dengan meninggalkan pekerjaan sehari-harinya terutama bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh atau pekerja kasar yang akan kehilangan penghasilan dihari tersebut serta jarak yang jauh dari jarak TPS dan jarak rumah sedangkan masyarakat yang bersangkutan tidak mempunyai sarana transportasi yang memadai.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mirian Budiardjo, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*.  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mulyadi Mohammad, 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*.  
Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Ranjabar Jacobus, 2014. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Sastropoetro Santoso, 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: P.T. Alumni.

Siagian P Sondang, 2018. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Surbakti Ramlan, 2010. *Memahami Ilmu Politik*.  
Jakarta: Grasindo

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo Bintaro, 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2014  
Tentang Pemilihan Kepala Desa  
Wawancara dengan sample terkait